EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM ASPEK SOSIAL DI KOTA BEKASI

Jannis Aulia Masik
NPP. 33.0265
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: jannismasik@gmail.com

Pembimbing Skripsi Dr. Drs Andi Masrich, Msi
Email: andimasrich@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *This study is motivated by the suboptimal provision of Green Open Space (GOS) in Bekasi City, particularly public green open spaces that only account for approximately 8.23%, which remains far below the national target mandated by law. This condition creates not only environmental problems but also social issues, such as the limited function of green open spaces as spaces for social interaction, recreation, and improvement of community quality of life.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the effectiveness of green open space policies in the social aspect in Bekasi City.* ***Method:*** *This study employs a qualitative approach with an interpretivist paradigm. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and accidental sampling techniques, involving officials from the Bekasi City Environmental Agency and users of green open spaces. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model (2014), consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by NVivo analysis. This study uses Dunn (2000) policy effectiveness theory as the analytical framework.* ***Result:*** *The findings show that green open space policies in Bekasi City from a social perspective are considered moderately effective, as reflected in increased social interaction, community activities, and utilization of public spaces. However, the effectiveness has not yet reached an optimal level due to several obstacles, including limited land availability, unequal accessibility, and inadequate facility maintenance. In addition, community participation in maintaining and utilizing green open spaces remains relatively low.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of green open space policies in the social aspect in Bekasi City has been fairly effective, although several improvements are still needed to optimize their social functions. It is recommended that the government improve the equitable distribution of green open spaces, enhance public facilities, and encourage greater community participation so that the social benefits of green open spaces can be maximized..*

Keywords: *Green Open Space; Policy Effectiveness; Social Aspect*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi, khususnya RTH publik yang baru mencapai sekitar 8,23% dan masih berada di bawah target nasional sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan permasalahan lingkungan, tetapi juga permasalahan sosial, seperti belum optimalnya fungsi RTH sebagai ruang interaksi sosial, rekreasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan ruang terbuka hijau dalam aspek sosial di Kota Bekasi **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretivisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling dan accidental sampling yang melibatkan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan masyarakat pengguna RTH. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta didukung dengan analisis NVivo. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan Dunn (2000) sebagai dasar analisis. **Hasil/Temuan**: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan RTH di Kota Bekasi dalam aspek sosial tergolong cukup efektif, ditandai dengan meningkatnya interaksi sosial, aktivitas masyarakat, serta pemanfaatan ruang publik. Namun, efektivitas tersebut belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan lahan, belum meratanya aksesibilitas, serta kurangnya pemeliharaan fasilitas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan RTH juga masih relatif rendah. **Kesimpulan**: Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan ruang terbuka hijau dalam aspek sosial di Kota Bekasi telah berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan berbagai perbaikan untuk mengoptimalkan fungsi sosialnya. Adapun saran penelitian ini yaitu perlunya meningkatkan pemerataan RTH, memperbaiki fasilitas publik, serta mendorong partisipasi masyarakat agar manfaat sosial ruang terbuka hijau dapat dirasakan secara maksimal.

Kata kunci: Aspek Sosial; Efektivitas Kebijakan; Ruang Terbuka Hijau

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rendahnya Rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Gunawan et al., 2025). Keberadaan RTH tidak hanya berfungsi sebagai penyeimbang ekologi dan paru-paru kota, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai ruang interaksi masyarakat, sarana rekreasi, edukasi lingkungan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan (Kasim, 2019). Dalam konteks pembangunan kota modern, keberadaan ruang terbuka hijau menjadi kebutuhan mendasar guna menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan di tengah tingginya laju urbanisasi dan pembangunan fisik perkotaan (Zhou & Rana, 2022). Dalam perspektif pengelolaan lingkungan perkotaan, pengembangan RTH juga berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas kawasan perkotaan termasuk potensi wisata dan daya tarik kota (Suripto, 2024).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan minimal sebesar 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Namun, realitas di berbagai kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan target tersebut masih menjadi tantangan, termasuk di Kota Bekasi. Kota Bekasi sebagai salah satu kota penyangga ibu kota memiliki tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang sangat pesat. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, industri, dan infrastruktur, sehingga keberadaan ruang terbuka hijau semakin terdesak. Dalam kajian tata ruang, RTH dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan struktur ruang kota dan keberlanjutan pembangunan wilayah (Samsudi, 2010).

Berdasarkan data Pemerintah Kota Bekasi, persentase Ruang Terbuka Hijau publik di Kota

Bekasi pada tahun 2023 baru mencapai sekitar 8,23%. Angka tersebut masih jauh di bawah target minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Keterbatasan luasan RTH ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan hidup, tetapi juga memengaruhi aspek sosial masyarakat perkotaan (Santoso et al., 2022). Minimnya ruang publik yang memadai menyebabkan terbatasnya ruang interaksi sosial masyarakat, berkurangnya sarana rekreasi yang murah dan inklusif, serta menurunnya kualitas kenyamanan hidup masyarakat di kawasan perkotaan yang padat penduduk (Peramesti, 2016). Pemerintahan merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati bersama (Labolo, 2011). Dalam kajian sosial perkotaan, persepsi masyarakat terhadap pentingnya ruang terbuka hijau menjadi faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan pengelolaan RTH (Januarisa et al., 2015). Fungsi sosial RTH juga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan (Dewiyanti, 2011).

Dalam perkembangannya, fungsi Ruang Terbuka Hijau tidak lagi hanya dipandang dari aspek ekologis semata, melainkan juga dari aspek sosial (Serter & Ayalp, 2024). Ruang terbuka hijau menjadi ruang publik yang mampu mempererat hubungan sosial masyarakat, mendorong partisipasi warga, membangun komunitas, serta menjadi sarana edukasi lingkungan. Selain itu, RTH juga memiliki fungsi produktif yang dapat mendukung ketahanan kota, termasuk aspek ekonomi dan ketahanan pangan perkotaan (Ridwan et al., 2017). Oleh karena itu, efektivitas program RTH tidak cukup hanya diukur dari jumlah taman atau luas lahan hijau yang tersedia, tetapi juga dari sejauh mana ruang tersebut mampu dimanfaatkan dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. (Sugiyanto & Sitohang, 2017).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan RTH, seperti pembangunan taman kota, revitalisasi ruang publik, penghijauan kawasan perkotaan, serta penyediaan fasilitas publik yang mendukung aktivitas masyarakat. Dalam implementasi kebijakan RTH, efektivitas pengelolaan sangat dipengaruhi oleh pola pemanfaatan ruang hijau serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan (Rushayati et al., 2020). Namun demikian, berbagai permasalahan masih ditemukan dalam implementasinya, seperti keterbatasan lahan, belum meratanya distribusi RTH, kurang optimalnya pemeliharaan fasilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan ruang terbuka hijau (Septadinata, 2022).

Selain itu, tingginya kepadatan penduduk di Kota Bekasi menyebabkan kebutuhan terhadap ruang publik semakin meningkat. Masyarakat perkotaan membutuhkan ruang yang dapat digunakan untuk berinteraksi sosial, berolahraga, berekreasi, maupun sekadar melepas kepenatan dari aktivitas perkotaan yang padat. Apabila kebutuhan tersebut tidak diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan, seperti menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, berkurangnya kohesi sosial, serta meningkatnya tingkat stres masyarakat perkotaan (Syahfitri, 2020). Dalam konteks penelitian ilmiah, pendekatan metodologi yang tepat diperlukan agar kajian kebijakan publik dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Sujarweni, 2019). Hal ini juga diperkuat oleh pentingnya pemilihan metode penelitian yang sesuai dengan tujuan kajian agar hasil penelitian lebih sistematis dan dapat dipercaya (Khoiri, 2018).

Penelitian mengenai efektivitas program Ruang Terbuka Hijau dalam aspek sosial menjadi penting dilakukan karena selama ini sebagian besar evaluasi kebijakan RTH lebih berfokus pada aspek fisik dan ekologis, seperti luasan lahan hijau atau jumlah pohon yang ditanam. Padahal, keberhasilan pengelolaan RTH juga ditentukan oleh sejauh mana ruang tersebut mampu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga kota secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas program Ruang Terbuka Hijau dalam aspek sosial di Kota Bekasi serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan RTH yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya budaya baca dan kurangnya kepedulian masyarakat Penelitian ini berfokus pada permasalahan belum optimalnya efektivitas program Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam aspek sosial di Kota Bekasi. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau, kenyataannya persentase RTH publik di Kota Bekasi masih berada jauh di bawah target nasional sebesar 20% untuk RTH publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi sosial ruang terbuka hijau belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Keterbatasan jumlah dan luasan ruang terbuka hijau berdampak pada terbatasnya ruang interaksi sosial masyarakat perkotaan. Di tengah tingginya kepadatan penduduk dan pesatnya pembangunan fisik di Kota Bekasi, masyarakat membutuhkan ruang publik yang nyaman, aman, dan inklusif untuk melakukan berbagai aktivitas sosial, rekreasi, olahraga, maupun edukasi lingkungan. Namun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan RTH, seperti kurangnya fasilitas pendukung, belum meratanya aksesibilitas antarwilayah, serta minimnya pemeliharaan fasilitas yang menyebabkan sebagian ruang terbuka hijau kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan ruang terbuka hijau juga menjadi permasalahan penting. Sebagian masyarakat masih memandang RTH hanya sebagai pelengkap estetika kota, bukan sebagai ruang sosial yang memiliki manfaat penting bagi kehidupan perkotaan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan fasilitas RTH menyebabkan beberapa taman kota mengalami kerusakan fasilitas, vandalisme, hingga kurang terawat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program ruang terbuka hijau tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengguna ruang publik.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dari aspek ekologis, tata ruang, maupun efektivitas kebijakan secara umum. Penelitian Lestari et al. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas penyediaan RTH di Kota Makassar masih rendah akibat lemahnya pengawasan dan keterbatasan anggaran. Penelitian Junaidi dan Salam (2025) menyoroti efektivitas Program Taman Maju Bersama di DKI Jakarta yang cukup baik namun masih terkendala koordinasi dan perubahan kebijakan. Sementara itu, penelitian Putra et al. (2025) membahas peran stakeholders dalam pengelolaan RTH di Hutan Kota Bekasi yang belum optimal akibat lemahnya komunikasi dan partisipasi masyarakat.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas pengelolaan ruang terbuka hijau, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas program Ruang Terbuka Hijau dari aspek sosial di Kota Bekasi, terutama dalam melihat bagaimana keberadaan RTH mampu mendukung interaksi sosial, aktivitas masyarakat, kenyamanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatannya. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut melalui analisis efektivitas program RTH dalam aspek sosial di Kota Bekasi berdasarkan perspektif kebijakan publik dan teori efektivitas Dunn (2000).

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian Penelitian ini penting dilakukan karena Ruang Terbuka Hijau memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat perkotaan. Di tengah pesatnya urbanisasi dan pembangunan fisik di Kota Bekasi, kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang sehat, nyaman, dan inklusif semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang mampu menggambarkan sejauh mana efektivitas program Ruang Terbuka Hijau dalam memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat Kota Bekasi.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada pentingnya evaluasi terhadap implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau yang selama ini lebih banyak diukur dari aspek kuantitatif dan ekologis, seperti luas lahan atau jumlah taman kota. Padahal, keberhasilan program RTH tidak hanya ditentukan oleh

keberadaan fisik ruang hijau, tetapi juga oleh sejauh mana ruang tersebut mampu dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana interaksi sosial, rekreasi, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas sosial RTH sebagai dasar dalam penyusunan strategi kebijakan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi praktis bagi Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaan ruang terbuka hijau di masa mendatang. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas fasilitas publik, pemerataan aksesibilitas RTH, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan ruang terbuka hijau secara optimal.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan data empiris dalam memahami efektivitas program RTH dari aspek sosial secara menyeluruh. Akibatnya, kebijakan yang dirumuskan berpotensi kurang tepat sasaran dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Selain itu, tanpa adanya evaluasi sosial terhadap pengelolaan RTH, ruang terbuka hijau berisiko hanya menjadi pelengkap estetika kota tanpa mampu memberikan manfaat sosial yang optimal bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, terbatasnya ruang interaksi sosial masyarakat, serta rendahnya kualitas hidup masyarakat perkotaan di Kota Bekasi.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), efektivitas kebijakan publik, serta aspek sosial dalam pembangunan perkotaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai ruang terbuka hijau memiliki variasi fokus, metode, pendekatan, dan objek penelitian yang berbeda-beda sesuai dengan konteks wilayah dan permasalahan yang diteliti.

Penelitian Amin & Saleh (2022) menggunakan metode deskriptif kualitatif . Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas implementasi RTRW dalam penyediaan RTH di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RTRW masih kurang efektif karena realisasi RTH baru mencapai 11,47% dari target 30%, yang dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan teori yang digunakan. Penelitian Lestari et al. (2024) lebih menitikberatkan pada efektivitas tata ruang dan aspek hukum dalam penyediaan RTH, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas program RTH dalam aspek sosial dengan menggunakan teori efektivitas kebijakan (Dunn,2000).

Penelitian Ayu (2019). menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini membahas efektivitas Program Taman Maju Bersama (TMB) dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan RTH di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut cukup efektif dalam meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau dan partisipasi masyarakat, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, dan lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan fokus analisis. Penelitian Junaidi & Salam (2025) berfokus pada program Taman Maju Bersama di DKI Jakarta, sedangkan penelitian ini meneliti efektivitas program RTH dalam aspek sosial di Kota Bekasi dengan fokus pada pemanfaatan ruang publik dan interaksi sosial masyarakat.

Selanjutnya, penelitian Berawi et al. (2024) menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan stakeholder analysis. Penelitian ini berfokus pada peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan Hutan Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RTH belum berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi dan komunikasi antar stakeholders serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada sudut pandang penelitian. Penelitian Putra et al. (2025) lebih menitikberatkan pada peran stakeholder dalam pengelolaan RTH, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas program RTH dalam aspek sosial berdasarkan manfaat dan fungsi sosial yang dirasakan masyarakat.

Penelitian oleh Firmansyah et al. (2018) menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan efektivitas fungsi ruang publik. Penelitian tersebut meneliti efektivitas fungsi sosial dan ekologis ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar

fungsi ruang terbuka hijau tergolong efektif, terutama pada aspek fasilitas penunjang dan perilaku pengunjung, namun masih terdapat beberapa aspek yang hanya cukup efektif, seperti fungsi kelembagaan dan pemanfaatan lahan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, teori analisis, dan karakteristik wilayah penelitian. Penelitian Milasari & Mulyadi (2021) dilakukan di Kota Samarinda dengan fokus pada fungsi RTH secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis efektivitas program RTH dalam aspek sosial di Kota Bekasi sebagai wilayah metropolitan penyangga ibu kota.

Adapun penelitian Hanan & Ariastita (2021) menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluasi tata ruang. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian lahan RTH terhadap RTRW Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan luas RTH sebesar 8% akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun, meskipun masih terdapat potensi optimalisasi lahan vegetasi sebagai ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian Pambudi dan Tambunan lebih menitikberatkan pada evaluasi kesesuaian lahan dan tata ruang, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas sosial program RTH dan bagaimana keberadaan ruang terbuka hijau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang interaksi sosial dan aktivitas publik.

Selain itu, penelitian oleh Handayani (2022) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi perkotaan. Penelitian tersebut membahas bagaimana ruang terbuka hijau dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang interaksi sosial dan aktivitas komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan taman kota mampu meningkatkan intensitas interaksi sosial masyarakat, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan fasilitas dan keamanan lingkungan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian dan fokus kebijakan. Penelitian Yulistyaningsih (2022) lebih menyoroti aspek interaksi sosial masyarakat secara sosiologis, sedangkan penelitian ini menganalisis efektivitas program RTH dari perspektif kebijakan publik menggunakan teori efektivitas (Dunn,2000).

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai ruang terbuka hijau masih didominasi oleh pembahasan mengenai efektivitas tata ruang, pengelolaan lingkungan, koordinasi stakeholders, serta fungsi ekologis dan fisik ruang terbuka hijau. Penelitian sebelumnya juga lebih banyak menggunakan metode kualitatif dengan berbagai pendekatan kebijakan publik dan tata ruang. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas program ruang terbuka hijau dalam aspek sosial, terutama dalam konteks Kota Bekasi sebagai kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi..

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan secara spesifik oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dari segi fokus kajian, pendekatan analisis, serta konteks penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada efektivitas tata ruang, pengelolaan lingkungan, kesesuaian lahan, dan koordinasi stakeholders dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada efektivitas program Ruang Terbuka Hijau dalam aspek sosial di Kota Bekasi.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokus analisis yang menempatkan Ruang Terbuka Hijau tidak hanya sebagai elemen ekologis dan fisik kota, tetapi juga sebagai ruang sosial yang berfungsi dalam membangun interaksi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, menyediakan sarana rekreasi publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan perkotaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap pengelolaan RTH dari sisi sosial masyarakat perkotaan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori efektivitas Dunn (2000) yang berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan efektivitas hukum, stakeholder analysis, maupun evaluasi tata ruang. Penggunaan teori Dunn (2000) memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas kebijakan berdasarkan aspek pencapaian tujuan, manfaat, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Kebaruan lainnya terdapat pada karakteristik objek penelitian, yaitu Kota Bekasi sebagai salah satu kota metropolitan penyangga ibu kota dengan tingkat urbanisasi dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan kebutuhan terhadap ruang terbuka hijau memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah baru dalam kajian kebijakan publik dan pengelolaan lingkungan perkotaan, khususnya terkait efektivitas Ruang Terbuka Hijau dalam aspek sosial.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas program Ruang Terbuka Hijau dalam aspek sosial di Kota Bekasi

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretivisme. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas program Ruang Terbuka Hijau dalam aspek sosial berdasarkan perspektif pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna ruang publik. Pendekatan kualitatif dinilai tepat karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual melalui interaksi langsung dengan informan dan kondisi nyata di lapangan (Nurdin & Hartati, 2019). Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada data angka, tetapi juga pada makna, persepsi, pengalaman, dan bentuk interaksi sosial masyarakat terhadap keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi. Selain itu, Simangunsong (2017) juga menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat menyesuaikan dengan dinamika lapangan, sehingga peneliti dapat mengakomodasi perubahan informasi yang terjadi selama proses pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada beberapa Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas, aktivitas masyarakat, serta bentuk pemanfaatan ruang publik oleh masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pemahamannya terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan RTH, beberapa pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang terlibat dalam pengelolaan RTH, pengelola taman kota, serta masyarakat pengguna Ruang Terbuka Hijau sebagai penerima manfaat langsung kebijakan tersebut. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari sisi pembuat kebijakan, pelaksana program, dan masyarakat pengguna ruang publik.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, dilakukan member check kepada beberapa informan untuk memastikan kesesuaian hasil wawancara dengan kondisi sebenarnya. Transferabilitas dilakukan dengan memberikan uraian penelitian secara rinci dan sistematis agar dapat dipahami dan diterapkan pada konteks penelitian lain yang serupa. Dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui audit trail dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis sehingga dapat ditelusuri kembali.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi

sesuai fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang diperoleh di lapangan. Analisis penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan Dunn (2000) sebagai dasar dalam menganalisis efektivitas program Ruang Terbuka Hijau dalam aspek sosial di Kota Bekasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pada beberapa Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Maret hingga April 2026. Rentang waktu tersebut digunakan untuk melaksanakan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, pengumpulan dokumentasi, serta proses analisis data penelitian. Dengan waktu penelitian tersebut, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang aktual dan mendalam mengenai efektivitas program Ruang Terbuka Hijau dalam aspek sosial di Kota Bekasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam aspek sosial di Kota Bekasi menggunakan pendapat Dunn (2000) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan dapat diukur melalui enam dimensi, yaitu kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), efektivitas, responsivitas (responsiveness), efisiensi, dan ketepatan (appropriateness). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kecukupan (Adequacy)

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi kecukupan melalui sejauh mana ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi mampu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, baik sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, maupun fasilitas publik bagi masyarakat perkotaan.

Tabel 1.
Jawaban responden terhadap kecukupan fasilitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi

Jawaban	Responden (orang)	Persen (%)
Sangat Memadai	10	20
Cukup Memadai	28	56
Tidak Memadai	12	24
Jumlah	50	100

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Berdasarkan Tabel 1, sebanyak 28 responden atau sekitar 56 persen menyatakan bahwa fasilitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi tergolong cukup memadai. Sementara itu, sebanyak 10 responden atau 20 persen menyatakan sangat memadai, dan 12 responden atau 24 persen menyatakan belum memadai. Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan RTH telah cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan fasilitas dan keterbatasan ruang publik di beberapa wilayah.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menyatakan bahwa “Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya menambah fasilitas pada taman-taman kota agar masyarakat merasa nyaman ketika memanfaatkan ruang terbuka hijau sebagai tempat rekreasi maupun aktivitas sosial.” Selain itu, salah satu masyarakat pengguna taman menyampaikan bahwa

“RTH di Kota Bekasi sudah cukup membantu masyarakat untuk tempat berkumpul dan olahraga, tetapi beberapa fasilitas seperti tempat duduk dan area bermain anak masih perlu ditambah.”

Berdasarkan observasi di lapangan, penulis menemukan bahwa sebagian Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi telah dilengkapi fasilitas pendukung seperti jogging track, area bermain anak, tempat duduk, dan fasilitas olahraga. Namun demikian, masih terdapat beberapa taman yang kurang terawat serta belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas sosial masyarakat secara optimal.

Penulis menyimpulkan bahwa dimensi kecukupan pada kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi tergolong cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan fasilitas dan kualitas pengelolaan agar kebutuhan sosial masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

3.2. Pemerataan (Equity*)*

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi pemerataan melalui sejauh mana distribusi dan aksesibilitas Ruang Terbuka Hijau dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah Kota Bekasi.

Tabel 2.
Jawaban responden terhadap pemerataan akses Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi

Jawaban	Responden (orang)	Persen (%)
Merata	15	30
Cukup Merata	23	46
Tidak Merata	12	24
Jumlah	50	100

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Berdasarkan Tabel 2, sebanyak 23 responden atau sekitar 46 persen menyatakan bahwa distribusi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi cukup merata. Sebanyak 15 responden atau 30 persen menyatakan sudah merata, sedangkan 12 responden atau 24 persen menyatakan belum merata. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang terbuka hijau.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menyatakan bahwa “Pemerintah terus berupaya membangun taman lingkungan di beberapa kecamatan agar masyarakat memiliki akses ruang publik yang lebih dekat dan mudah dijangkau.” Namun demikian, salah satu masyarakat menyampaikan bahwa “Taman kota lebih banyak berada di pusat kota, sedangkan di wilayah permukiman padat masih minim ruang terbuka hijau.”

Berdasarkan observasi lapangan, penulis menemukan bahwa sebagian besar taman kota berada di kawasan strategis dan pusat pemerintahan, sementara beberapa wilayah padat penduduk masih memiliki keterbatasan ruang publik. Kondisi tersebut menyebabkan belum seluruh masyarakat memperoleh akses yang sama terhadap pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Penulis menyimpulkan bahwa dimensi pemerataan dalam kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi tergolong cukup, namun masih diperlukan pemerataan pembangunan dan distribusi ruang terbuka hijau agar manfaat sosialnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

3.3. Efektivitas

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi efektivitas melalui sejauh mana keberadaan Ruang Terbuka Hijau mampu mencapai tujuan kebijakan dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial dan kenyamanan masyarakat.

Tabel 3.
Jawaban responden terhadap efektivitas Ruang Terbuka Hijau dalam meningkatkan aktivitas sosial masyarakat

Jawaban	Responden (orang)	Persen (%)
Efektif	26	52
Cukup Efektif	19	38
Tidak Efektif	5	10
Jumlah	50	100

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Berdasarkan Tabel 3, sebanyak 26 responden atau 52 persen menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau efektif dalam meningkatkan aktivitas sosial masyarakat. Sebanyak 19 responden atau 38 persen menyatakan cukup efektif, sedangkan 5 responden atau 10 persen menyatakan tidak efektif.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pengguna RTH menyatakan bahwa "Taman kota sekarang sering digunakan untuk olahraga, kegiatan komunitas, dan tempat berkumpul keluarga sehingga suasana sosial masyarakat menjadi lebih hidup." Selain itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menyampaikan bahwa "Pembangunan RTH memang diarahkan tidak hanya untuk penghijauan, tetapi juga sebagai ruang sosial masyarakat."

Berdasarkan observasi penulis, Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi cukup aktif dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan sosial, seperti olahraga pagi, kegiatan komunitas, rekreasi keluarga, dan aktivitas anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan RTH telah memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat.

Penulis menyimpulkan bahwa dimensi efektivitas kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam aspek sosial di Kota Bekasi tergolong baik karena telah mampu meningkatkan aktivitas sosial dan kualitas interaksi masyarakat.

3.4. Responsivitas *(Responsiveness)*

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi responsivitas melalui sejauh mana pemerintah mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Tabel 4.
Jawaban responden terhadap respons pemerintah dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Jawaban	Responden (orang)	Persen (%)
Responsif	20	40
Cukup Responsif	22	44
Tidak Responsif	8	16
Jumlah	50	100

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Berdasarkan Tabel 4, sebanyak 22 responden atau 44 persen menyatakan bahwa pemerintah cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Sebanyak 20 responden atau 40 persen menyatakan responsif, sedangkan 8 responden atau 16 persen menyatakan tidak responsif.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat menyatakan bahwa "Ketika ada fasilitas taman yang rusak biasanya pemerintah cukup cepat memperbaiki, tetapi ada juga beberapa taman yang perbaikannya cukup lama." Selain itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa "Kami menerima masukan masyarakat melalui laporan langsung maupun media sosial untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan taman kota."

Berdasarkan observasi penulis, pemerintah cukup aktif melakukan perawatan taman dan memberikan tanggapan terhadap keluhan masyarakat, meskipun dalam beberapa kasus masih ditemukan keterlambatan penanganan fasilitas yang rusak.

Penulis menyimpulkan bahwa dimensi responsivitas dalam kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi tergolong cukup baik karena pemerintah telah berupaya merespons kebutuhan masyarakat, meskipun masih diperlukan peningkatan kecepatan dan kualitas pelayanan.

3.5. Efisiensi

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi efisiensi melalui sejauh mana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Tabel 5.
Jawaban responden terhadap efisiensi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Jawaban	Responden (orang)	Persen (%)
Efisien	18	36
Cukup Efisien	24	48
Tidak Efisien	8	16
Jumlah	50	100

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Berdasarkan Tabel 5, sebanyak 24 responden atau sekitar 48 persen menyatakan bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tergolong cukup efisien. Sebanyak 18 responden atau 36 persen menyatakan efisien, sedangkan 8 responden atau 16 persen menyatakan tidak efisien.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah berupaya memaksimalkan anggaran pemeliharaan taman dengan melibatkan petugas lapangan dan kerja sama dengan masyarakat sekitar." Selain itu, salah satu masyarakat menyampaikan bahwa "Sebagian taman sudah cukup baik pengelolaannya, tetapi masih ada fasilitas yang kurang dimanfaatkan secara maksimal."

Berdasarkan observasi lapangan, penulis menemukan bahwa beberapa Ruang Terbuka Hijau telah dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kegiatan masyarakat, namun masih ditemukan fasilitas yang kurang terawat akibat keterbatasan sumber daya dan anggaran pemeliharaan.

Penulis menyimpulkan bahwa dimensi efisiensi dalam kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi tergolong cukup baik, meskipun masih diperlukan optimalisasi pengelolaan fasilitas dan pemanfaatan sumber daya secara lebih maksimal.

3.6. Ketepatan (Appropriateness)

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi ketepatan melalui sejauh mana kebijakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Kota Bekasi.

Tabel 6.
Jawaban responden terhadap ketepatan kebijakan Ruang Terbuka Hijau

Jawaban	Responden (orang)	Persen (%)
Tepat	27	54
Cukup Tepat	18	36
Tidak Tepat	5	10
Jumlah	50	100

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Berdasarkan Tabel 6, sebanyak 27 responden atau sekitar 54 persen menyatakan bahwa kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi sudah tepat sesuai kebutuhan masyarakat. Sebanyak 18 responden atau 36 persen menyatakan cukup tepat, sedangkan 5 responden atau 10 persen menyatakan tidak tepat.

Hasil wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa "Keberadaan taman kota sangat membantu masyarakat untuk berolahraga dan berkumpul bersama keluarga tanpa harus mengeluarkan biaya besar." Selain itu, pihak pemerintah menyampaikan bahwa "Pembangunan RTH diarahkan agar dapat memberikan manfaat sosial, lingkungan, dan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi."

Berdasarkan observasi penulis, keberadaan Ruang Terbuka Hijau telah dimanfaatkan masyarakat dari berbagai kelompok usia sebagai sarana rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan RTH telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.

Penulis menyimpulkan bahwa dimensi ketepatan dalam kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi tergolong baik karena kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan perkotaan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam aspek sosial di Kota Bekasi memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat perkotaan, khususnya dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial, menyediakan sarana rekreasi publik, serta menciptakan ruang aktivitas masyarakat yang lebih nyaman dan sehat. Penulis menemukan temuan utama bahwa efektivitas kebijakan RTH dalam aspek sosial di Kota Bekasi tergolong cukup baik karena didukung oleh keberadaan fasilitas publik, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang terbuka, serta adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan taman kota dan ruang publik.

Sama halnya dengan temuan penelitian Milasari & Mulyadi (2021) yang menyatakan bahwa fungsi Ruang Terbuka Hijau mampu meningkatkan kualitas aktivitas sosial masyarakat perkotaan melalui penyediaan fasilitas publik dan ruang interaksi masyarakat, penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan RTH di Kota Bekasi dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana olahraga, rekreasi keluarga, dan tempat berkumpul komunitas. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya karena masyarakat Kota Bekasi menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi dalam memanfaatkan taman kota sebagai ruang sosial publik.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Yulistyaningsih (2022) yang menemukan bahwa Ruang Terbuka Hijau memiliki peran penting dalam meningkatkan interaksi sosial

masyarakat perkotaan. Penulis menemukan bahwa keberadaan taman kota di Kota Bekasi mampu mempererat hubungan sosial antar masyarakat melalui berbagai aktivitas bersama seperti olahraga pagi, kegiatan komunitas, dan aktivitas keluarga pada akhir pekan. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi sosial Ruang Terbuka Hijau tidak hanya sebagai elemen lingkungan, tetapi juga sebagai ruang pembangunan kehidupan sosial masyarakat perkotaan.

Temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian Junaidi & Salam (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan ruang terbuka hijau dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan fasilitas publik. Penulis menemukan bahwa pemerintah Kota Bekasi cukup responsif dalam melakukan perawatan taman kota dan menerima aspirasi masyarakat terkait pengelolaan fasilitas Ruang Terbuka Hijau. Dukungan pemerintah tersebut memberikan dampak positif terhadap kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kondisi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berbeda dengan temuan Lestari et al. (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan RTH masih rendah akibat lemahnya implementasi tata ruang dan penegakan kebijakan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi telah cukup efektif dalam aspek sosial meskipun masih terdapat keterbatasan fasilitas dan distribusi ruang terbuka hijau yang belum sepenuhnya merata. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik wilayah penelitian serta fokus penelitian yang berbeda. Penelitian Lestari et al. (2024) lebih berfokus pada aspek tata ruang dan ketersediaan lahan, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada manfaat sosial yang dirasakan masyarakat.

Berbeda pula dengan penelitian Putra et al. (2025) yang menyoroti lemahnya koordinasi stakeholders dalam pengelolaan Hutan Kota Bekasi, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi telah menunjukkan adanya koordinasi yang cukup baik antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam pemanfaatan fasilitas sosial dan kegiatan publik di taman kota. Meskipun demikian, penulis tetap menemukan beberapa kendala berupa keterbatasan pemeliharaan fasilitas dan belum meratanya pembangunan Ruang Terbuka Hijau di beberapa wilayah permukiman padat penduduk.

Adanya kebijakan Ruang Terbuka Hijau ini juga diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat perkotaan, baik dari sisi sosial, kesehatan, maupun lingkungan. Keberadaan ruang publik yang nyaman dapat membantu masyarakat mengurangi tingkat stres, meningkatkan interaksi sosial, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan manusiawi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghijauan kota, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial masyarakat perkotaan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam aspek sosial di Kota Bekasi. Salah satu faktor penghambat utama adalah belum meratanya distribusi Ruang Terbuka Hijau di seluruh wilayah Kota Bekasi, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas ruang publik dan taman kota.

Selain itu, penulis juga menemukan bahwa keterbatasan fasilitas pendukung dan pemeliharaan sarana menjadi kendala dalam optimalisasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Beberapa fasilitas seperti tempat duduk, area bermain anak, penerangan taman, dan kebersihan lingkungan masih memerlukan peningkatan agar masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik dengan lebih nyaman dan aman.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang cukup kuat dalam mendukung efektivitas kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi, yaitu tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan taman kota sebagai ruang aktivitas sosial. Masyarakat dari berbagai kelompok usia aktif menggunakan

Ruang Terbuka Hijau untuk olahraga, rekreasi keluarga, kegiatan komunitas, dan aktivitas sosial lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan RTH memang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat perkotaan.

Penulis juga menemukan bahwa dukungan pemerintah daerah melalui pembangunan fasilitas taman kota dan pengelolaan ruang publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah Kota Bekasi cukup aktif melakukan pemeliharaan taman dan memberikan respons terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya masih diperlukan peningkatan pemerataan pembangunan dan kualitas pengelolaan fasilitas Ruang Terbuka Hijau.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam aspek sosial di Kota Bekasi telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang mampu dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana interaksi sosial, rekreasi publik, olahraga, serta aktivitas komunitas masyarakat perkotaan. Selain itu, pemerintah Kota Bekasi juga cukup responsif dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas Ruang Terbuka Hijau sehingga keberadaan taman kota memberikan manfaat sosial yang positif bagi masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas kebijakan Ruang Terbuka Hijau dipengaruhi oleh adanya dukungan pemerintah daerah, pemanfaatan fasilitas publik oleh masyarakat, serta tingginya kebutuhan masyarakat perkotaan terhadap ruang sosial yang nyaman dan mudah diakses. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti belum meratanya distribusi Ruang Terbuka Hijau di seluruh wilayah Kota Bekasi serta keterbatasan fasilitas pendukung dan pemeliharaan pada beberapa taman kota.

Guna meningkatkan efektivitas kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam aspek sosial di Kota Bekasi, disarankan agar pemerintah daerah lebih meningkatkan pemerataan pembangunan Ruang Terbuka Hijau, khususnya pada wilayah permukiman padat penduduk. Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan pemeliharaan fasilitas publik, meningkatkan kualitas sarana pendukung taman kota, serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau agar manfaat sosialnya dapat dirasakan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada waktu dan biaya penelitian sehingga pengumpulan data dilakukan dalam ruang lingkup yang terbatas. Selain itu, penelitian hanya difokuskan pada beberapa Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi sehingga belum sepenuhnya menggambarkan seluruh kondisi Ruang Terbuka Hijau yang ada di wilayah Kota Bekasi secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan temuan yang diperoleh masih bersifat awal. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan yang lebih mendalam terkait efektivitas Ruang Terbuka Hijau dalam aspek sosial, lingkungan, maupun ekonomi guna memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada

seluruh informan, masyarakat pengguna Ruang Terbuka Hijau, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amin, N. I., & Saleh, A. (2022). Peran pemerintah dalam mengembangkan kota hijau (green government) di Kota Makassar. *Pallangga Praja*, *4*(1), 1–9. https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/2634

Ayu, A. P. (2019). Peran ruang terbuka hijau dalam citra kota: Studi kasus Taman Suropati, Jakarta. *Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi, 18(1), 53–66*. Tersedia di https://www.researchgate.net/publication/337068179_PERAN_RUANG_TERBUKA_HIJAU_DALAM_CITRA_KOTA_Studi_Kasus_Taman_Suropati_Jakarta

Berawi, M. A., Sari, M., Lumbantobing, V., Susilowati, S. I., Susantono, B., Woodhead, R., & Sejatiguna, P. M. (2024). Developing crowdfunding-based financing scheme to increase potential of micro, small, and medium business in urban green space. *International Journal of Technology, 15*(2), 259–266. https://doi.org/10.14716/ijtech.v15i2.6663

Dewiyanti, D. (2011). Ruang terbuka hijau Kota Bandung: Suatu tinjauan awal taman kota terhadap konsep kota layak anak. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 7(1), 14–20. Tersedia di https://repository.unikom.ac.id/30481/RUKI+1RUKI+1

Dunn,W. N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press

Firmansyah, A. R., Soeriaatmadja, R., & Wulanningsih. (2018). A set of sustainable urban landscape indicators and parameters to evaluate urban green open space in Bandung City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 179*(1), 012016. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/179/1/012016

Gunawan, I., Simangunsong, F., Rizari Rizari, & Masrich, A. (2025). Human Resource Capacity Development of Bureaucrats within the Local Government of East Barito Regency, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *15*(1), 50–61. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/5287

Hanan, H. M., & Ariastita, P. G. (2021). Penilaian efektivitas fungsi taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik di Kota Malang. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), D47–D52. Tersedia di https://www.semanticscholar.org/paper/b38776599d455c7a93fd13f2904586337f953875

Handayani, Y. S. (2022). Problema ruang terbuka hijau di Kota Bandung. *shel* https://ojs.unikom.ac.id/index.php/wilayahkota/article/view/6479OpenJournal+1Open Journal+1

Januarisa, D. V., Hardiansyah, G., & Fahrizal. (2015). Persepsi masyarakat perkotaan terhadap pentingnya fungsi ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Pontianak. *Jurnal Hutan Lestari*, *4*(3), 263–272. Tersedia di https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfkh/article/view/15812

Junaidi, D. R., & Salam, R. (2025). Efektivitas Program Taman Maju Bersama dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta. *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 85–115. https://doi.org/10.62383/studi.v2i2.256

Kasim, J. A., Yusof, M. J. M., & Shafri, H. Z. M. (2019). The many benefits of urban green spaces. *CSID Journal of Infrastructure Development, 2(1), 103–116*. Tersedia di https://scholarhub.ui.ac.id/jid/vol2/iss1/11/Scholar Hub

Khoiri, Nur. (2018). *Metodologi penelitian pendidikan*. Semarang: Southeast Asian Publis

Labolo, M. (2011). *Memahami ilmu pemerintahan*. Rajagrafindo Persada.

Lestari, E. T., Nawi, S., & Razak, A. (2024). Efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(c). https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1779

Milasari, L. A., & Mulyadi, M. (2021). Pemetaan Infrastruktur Jalan Pada Sentra Produksi Pertanian di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. *Kurva S : Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Teknik Sipil*, *9*(2), 62. https://doi.org/10.31293/teknikd.v9i2.6252

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Universitas Indonesia Press.

Nurdin, M., & Hartati, N. (2019). *Pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial dan kebijakan*.Penerbit Universitas Terbuka.

Peramesti, N. P. D. Y. (2016). Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Politikologi*, https://ejournal.ipdn.ac.id/JP/article/view/499

Putra, J. F., Djumiarti, T., & Yuniningsih, T. (2025). Analisis peran stakeholders dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Hutan Kota Bekasi. *Journal of Management and Public Policy*, 13(3), 736–753. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/45486.

Ridwan, M., Sinatra, F., & Natalivan, P. (2017). Promoting productive urban green open space towards food security: Case study Taman Sari, Bandung. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 91*(1), 012030. https://doi.org/10.1088/1755-1315/91/1/012030

Rushayati, S. B., Hermawan, R., Setiawan, Y., Wijayanto, A. K., Prasetyo, L. B., & Permatasari, P. A. (2020). The effect of utilization patterns of green open space on the dynamics change of air quality due to the Covid-19 pandemic in Jabodetabek region. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 10(4)*, 559–567. Tersedia di https://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/article/view/32550

Samsudi. (2010). Ruang terbuka hijau: Kebutuhan tata ruang perkotaan Kota Surakarta. *Journal of Rural and Development, 1(1), 1–10*. Tersedia di https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1836Jurnal Universitas Sebelas Maret+1Jurnal Universitas Sebelas Maret+1

Santoso, E. B., Rahmadanita, A., & Ryandana, M. D. (2022). Ruang terbuka hijau di Kota Samarinda: Pencapaian, permasalahan dan upayanya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 12(1), 103–126. Tersedia di https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/2828

Septadinata, M. F. (2022). Pembangunan berkelanjutan ruang terbuka hijau dalam pencegahan bencana banjir di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Tersedia di https://eprints.ipdn.ac.id/9771/

Serter, M., & Ayalp, G. G. (2024). A Holistic Analysis on Risks of Post-Disaster Reconstruction Using RStudio Bibliometrix. *In Sustainability (Switzerland) (Vol. 16, Issue 21)*. https://doi.org/10.3390/su16219463

Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sujarweni, V. Wiratna. (2019) *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiyanto, E., & Sitohang, C. A. (2017). Optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau sebagai ruang publik di Taman Ayodia Kota Jakarta Selatan. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2(1)*,

205–218. Tersedia di https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/238

Suripto. (2024). Upaya Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung dalam Penataan Hutan Kota untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata di Kota Bandung. *Jurnal Media Birokrasi*. 6(1), 39-40. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/4124

Syahfitri, C. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai Di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, *3*(2), 62-74. https://Doi.Org/10.33701/Jkp.V3i2.1306

Yulistyaningsih, N. (2022). Implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Tersedia di https://eprints.ipdn.ac.id/15138/1/JURNAL_NADIA%20YULISTYANINGSIH_30.0203-2.pdf

Zhou, X., & Rana, M. P. (2022). Social benefits of urban green space: A conceptual framework of valuation and accessibility measurements. *Management of Environmental Quality: An International Journal, 23(2), 173–189*. https://doi.org/10.1108/14777831211204921